

**PENGGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN DI ZONA EKONOMI
EKSLUSIF INDONESIA OLEH NEGARA TAK BERPANTAI
MENURUT *UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE
SEA 1982 (UNCLOS)***

MOHAMMAD TASRIH / D 101 07 356

ABSTRAK

Konsep ZEE yang terdapat dalam UNCLOS 1982 secara keseluruhan telah membentuk hubungan-hubungan baru di antara negara-negara dalam pemakaian sumber daya alam hayati laut, riset ilmiah dan pencegahan terhadap pencemaran laut, pengelolaan sumber daya ikan di zona ekonomi eksklusif oleh negara yang tak berpantai menurut United Nations Convention on the law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) dan pengelolaan sumber daya ikan oleh negara tak berpantai di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Di zona ekonomi eksklusif, semua Negara, baik Negara pantai atau tak berpantai, menikmati, dengan tunduk pada ketentuan yang relevan konvensi ini, kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel-kabel dan pipa di dasar laut yang di sebut dalam Pasal 87 dan penggunaan laut lain yang sah menurut hukum.

Kata Kunci : Sumber Daya Ikan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Unclos 1982

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Internasional dapat dikatakan sebagai seperangkat aturan dimana suatu negara merasa terikat untuk menaatinya dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Apabila kita tempatkan dalam konteks Hukum Laut, maka Hukum Laut Internasional adalah aturan-aturan yang mengikat negara dalam melakukan hubungan internasional atau hubungan dengan negara lain yang menyangkut masalah kelautan. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai Hukum Laut Internasional yang mengatur hubungan negara-negara sebagai subyek yang berkepentingan dengan masalah laut, terutama antara negara pantai dan negara-negara yang memiliki kondisi geografis yang unik dalam hubungannya dengan laut. Negara-negara ini disebut negara tidak berpantai dan negara yang kurang beruntung secara geografis. Kelompok negara ini berusaha menuntut haknya atas penggunaan laut terutama atas sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi

Eksklusif¹ sebagai suatu konsep yang baru timbul dalam masyarakat internasional, karena memang dirasakan kurang adil apabila mereka akibat kondisi geografis yang unik ini tidak dapat ikut mengambil hasil dari laut. Tuntutan mereka atas sumber daya alam hayati di ZEE akhirnya dirumuskan melalui *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*² dan dicantumkan pada pasal 69 dan pasal 72 pada UNCLOS 1982. Tetapi ternyata pencantuman ini belum menjamin hak-hak negara ini karena perumusan di dalam konvensi memiliki banyak kelemahan dan belum ada pelaksanaan yang benar-benar berarti atas hak-hak mereka dalam praktek hubungan antar negara. Oleh karena itu, negara-negara ini perlu mencari alternatif-alternatif lain dalam memenuhi hak-haknya ini seperti dengan melakukan pendekatan secara bilateral dan regional.³

¹Selanjutnya di singkat menjadi ZEE

²Selanjutnya *United Nations Convention on the law of the sea 1982* ditulis UNCLOS 1982

³Prastianto, Stephanus desi, hak berdaulat Negara tidak berpantai dan negara tidak kurang beruntung secara geografis dalam pemanfaatan sumber daya alam

Konsep ZEE yang terdapat dalam UNCLOS 1982 secara keseluruhan telah membentuk hubungan-hubungan baru di antara negara-negara dalam pemakaian sumber daya alam hayati laut, riset ilmiah dan pencegahan terhadap pencemaran laut. Perubahan yang paling mendasar dari konsep ZEE ini terjadi dalam hal pembagian tradisional antara laut teritorial yang merupakan zona kedaulatan negara pantai dan laut lepas yang terbuka untuk semua bangsa. Perubahan tersebut membawa implikasi tersendiri dalam bidang hukum laut internasional, diantaranya adalah munculnya perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi diantara para penulis dan ahli hukum internasional. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dimaklumi karena konsep ZEE merupakan dasar hukum yang menentukan hubungan antara hak-hak serta kepentingan dari negara pantai dan semua negara dalam pemakaian ZEE.⁴

Pasal 69 UNCLOS 1982 telah memberikan ketentuan mengenai hak-hak negara tidak berpantai di wilayah ZEE suatu negara. Pengaturan negara tidak berpantai ini dimaksudkan agar negara tersebut meskipun tidak memiliki laut, namun dapat berpartisipasi secara adil mengelola bagian dari surplus perikanan negara pantai. Hak-hak tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi dan geografi dari negara tidak berpantai dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konservasi Sumber Kekayaan Hayati (Pasal 61 UNCLOS 1982) dan pemanfaatan sumber kekayaan hayati (Pasal 62 UNCLOS 1982). Partisipasi ini harus didasarkan pada region atau sub-region yang sama, yaitu wilayah yang secara geografis dibagi dibawah wilayah laut menurut FAO⁵

hayati dizona ekonomi eksklusif
suatunegara, website: <<https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=349&id=120653&src=k&f=1>> diakses pada tanggal 12 oktober 2013.

⁴Vivin R “perbedaan pemanfaatan zee antara negara berpantai dengan negaratidakberpantai, website: <<http://inspirasi.hukum.blogspot.com/2011/09/perbedaan-pemanfaatan-zee-antara-negara.html>>.

⁵FAO ialah organisasi yang bergerak di bidang ketahanan pangan dan pertanian yang bertujuan

(Food and Agriculture Organization) atau komisi Regional PBB.⁶

Secara umum, dalam memberikan kesempatan untuk berpartisipasi kepada negara lain, negara pantai harus mempertimbangkan berbagai faktor, diantaranya adalah arti penting dari sumber kekayaan hayati bagi perekonomian nasionalnya dan ketentuan pasal 69 UNCLOS 1982 tentang hak negara tidak berpantai dan pasal 70 UNCLOS 1982 tentang hak negara secara geografis tidak diuntungkan.

Kenyataan menunjukkan bahwa di kawasan Asia belum ada satupun negara tidak berpantai yang mengambil surplus dari jumlah tangkapan bersama disebuah negara pantai. Sebagian besar negara pantai di Asia bahkan melakukan kebijakan menjual surplus, termasuk Indonesia. Menjual dalam hal ini diartikan memberikan jatah surplus kepada negara yang berani membeli ikan dengan harga tinggi. Jika kenyataan yang terjadi seperti ini, maka hanya negara tertentu saja yang dapat memanfaatkan sisa dari stok perikanan di ZEE negara lain yaitu negara yang statusnya lebih kaya dibanding dengan negara tidak berpantai. Sementara itu negara tidak berpantai tidak dapat bersaing karena sebagian besar adalah negara berkembang, bukan negara kaya.

Selain persoalan prioritas, perbedaan lain yang berkaitan dengan hak negara-negara tidak berpantai di ZEE adalah kewajiban untuk menentukan pelabuhan akses tempat bersandarnya kapal melalui sebuah perjanjian. Ketentuan ini dimuat dalam surat perjanjian antara negara pantai dengan negara tidak berpantai. Surat perjanjian itu harus ditunjukkan oleh negara tidak berpantai sebelum membuat perjanjian perikanan dengan negara berpantai. Selain dua

memberantas kelaparan, kerawanan pangan dan kekurangan gizi, penghapusan kemiskinan dan mendorong maju kemajuan ekonomi dan sosial serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam termasuk tanah, air, udara, iklim dan sumber daya genetik untuk kepentingan generasi saat ini dan akan datang. Website: <http://www.fao.org/about/en/>.

⁶Perserikatan bangsa-bangsa di singkat menjadi PBB

perbedaan tersebut, prioritas hak dan tempat bersandarnya kapal, tidak ada lagi hal yang bersifat prinsip yang membedakan pelaksanaan hak antara negara tidak berpantai dan negara pantai di ZEE.

Praktek yang dilakukan oleh negara-negara pantai dalam hal pemanfaatan surplus perikanan yang ada di zona ekonomi eksklusifnya sangat bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 69 UNCLOS 1982. Maka kesempatan negara tidak berpantai untuk menikmati surplus di ZEE negara pantai sangat dipengaruhi oleh politik ekonomi negara pantai. Dapat dimaklumi jika negara berkembang seperti Indonesia lebih memilih negara yang masuk dalam kategori mampu membeli izin penangkapan ikan sesuai dengan harga yang diharapkan. Sedangkan negara tidak berpantai yang sebagian besar pertumbuhan ekonominya di bawah Indonesia seperti Laos, kemungkinan besar tidak mampu membeli izin penangkapan ikan di Indonesia karena ada negara lain seperti Thailand, Taiwan dan Filipina yang mampu membayar dengan harga lebih tinggi. Tentunya hal ini akan lebih menguntungkan secara ekonomi bagi Indonesia. Selain itu, jika negara pantai menjual surplusnya kepada negara yang mampu, ada kemungkinan mendapat kompensasi lain yang lebih baik melalui perjanjian timbal balik.

Selain itu, proses perjanjian perikanan antara negara tidak berpantai dengan negara pantai lebih rumit karena negara tidak berpantai harus mengawalinya dengan membuat perjanjian pendahuluan dengan negara tetangga, yaitu perjanjian tentang pembuatan pelabuhan akses atau pelabuhan singgah bagi kapalnya, maka perjanjian perikanan dapat dibuat. Proses pembuatan perjanjian ini tentunya lebih rumit dibandingkan dengan perjanjian yang dibuat di antara negara pantai yang satu dengan yang lainnya.

Saat ini pemerintah Indonesia telah memberikan kesempatan kepada pihak asing untuk memanfaatkan sumber daya perikanan di ZEE Indonesia. Data yang tercantum pada departemen kelautan dan perikanan menunjukkan bahwa tahun 2002 pemerintah

Indonesia telah menentukan bahwa jumlah tangkapan yang diperbolehkan dikawasan ZEE Indonesia sebanyak 1,5 juta ton dari potensi keseluruhan.⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang dipaparkan pada latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif oleh Negara yang Tak Berpantai Menurut *United Nations Convention on the law of the sea 1982* (UNCLOS 1982)?
2. Bagaimanakah Pengelolaan Sumber Daya Ikan oleh Negara Tak Berpantai di Zzona Ekonomi Eksklusif Indonesia?

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Oleh Negara Yang Tak Berpantai menurut *United Nations Convention on the law of the sea 1982* (UNCLOS 1982)

Ketentuan-ketentuan yang mengatur sebagai zona maritim dengan status yang berbeda-beda menurut Etty.R.Agoes secara garis besarnya konvensi membagi laut kedalam dua bagian zona maritim yaitu zona-zona yang berada di bawah dan di luar yuridiksi nasional. Zona-zona maritim yang berada di bawah yuridiksi nasional dibagi lagi ke dalam zona-zona maritime yang berada di bawah kedaulatan penuh suatu Negara pantai, dan zona-zona maritime bagian-bagian di mana Negara pantai dapat melaksanakan wewenang-wewenangannya serta hak-hak khusus yang di atur dalam konvensi hukum laut 1982.⁸

Menurut Marie Jacobsen konvensi hukum laut 1982 berisi ketentuan-ketentuan

⁷*Ibid.*

⁸Etty R.Agoes, Pengaturan Tentang Wilayah Perairan Indonesia dan Kaitannya dengan Hukum Laut 1982, Makalah yang di sampaikan pada ceramah Fakultas Hukum Universitas Trisaksti, Jakarta, 16-19 Januari 1996, sebagai mana dikutip oleh: Dikdik Mohamad, Hukum Laut Internasional dan pengaturannya di Indonesia, hlm.19

yang mengatur dua zona maritime yang di bawah kedaulatan negara pantai, yaitu perairan pedalaman dan laut territorial. Ditinjau dari segi hukum internasional, ada dua cara untuk menjelaskan konsep kedaulatan di laut: pertama, kedaulatan dilihat dalam kaitannya dengan zona maritime, dimana suatu negara pantai atau negara kepulauan mempunyai kedaulatan atas perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial, kedaulatan di kaitkan dengan yurisdiksi suatu negara pantai.

Zona Ekonomi Eksklusif merupakan perkembangan dalam pengaturan masalah kelautan yang berkaitan dengan pemanfaatan secara ekonomi sumber daya alam hayati maupun nonhayati dengan tetap memperhatikan sapek-aspek kelestarian lingkungan, kelestarian sumber daya, dan pengawasannya. Undang-undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) merupakan tindak lanjut dari rezim ZEE yang diatur dalam konvensi hukum laut 1982. Nilai-nilai yang melatar belakangi konsep ZEE adalah :⁹

- a. Melindungi negara pantai dari kemungkinan di habiskannya sumber daya alam hayati, dalam hal ini sumber daya ikan di wilayah pantainya oleh aktivitas negara lain karena penerapan rezim laut bebas. Sumber daya ikan bergerak tidak mengenal batas wilayah dan merupakan sumber daya yang *renewable*, artinya secara alamiah memiliki kemampuan untuk memulihkan atau mempertahankan keberadaannya melalui proses perkembangbiakan. Oleh karena itu konsep pengelolaan yang lahir dari rezim ZEE adalah pengelolaan berdasarkan asas kelestarian, yaitu., pemanfaatan sumberdaya hayati dalam hal ini penangkapan ikan harus memperhatikan aspek-aspek biologi ikan (usia ikan, jumlah penangkapan, dan alat penangkapan yang digunakan).
- b. Melindungi negara pantai dari aspek lingkungan dan dalam penelitian ilmiah agar negara pantai dapat memanfaatkan

sumber daya hayati yang ada di wilayahnya secara optimal dan berkelanjutan.

Hak dan kewajiban dalam pasal 56 UNCLOS 1982 dimana negara pantai pada Zona Ekonomi Eksklusif adalah:

- a. Hak berdaulat untuk mengadakan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi, dan pengurusan sumber kekayaan alam hayati atau bukan hayati dari perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya.
- b. Hak berdaulat atas kegiatan-kegiatan eksplorasi dan eksploitasi seperti produksi energi dari air dan angin.
- c. Yurisdiksi untuk pendirian dan pemanfaatan pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan, dan pembinaan dari lingkungan maritim.

Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya tersebut, Negara pantai juga harus menghormati hak dan kewajiban yang dimiliki negara lain seperti kebebasan pelayaran dan penerbangan atau kebebasan meletakkan kabel-kabel dan pipa-pipa di bawah laut, yang dibenarkan secara internasional.

Selain hak-hak di atas, dalam konvensi ini negara pantai di haruskan di zona ekonomi eksklusifnya dan menentukan kapasitas penangkapannya. Tindakan-tindakan tersebut harus ditetapkan agar populasi ikan berada pada tingkat yang dapat memberikan hasil tangkapan lestari (*maximum sustainable yield*). Jika hal ini terlanggar, bukan tidak mungkin ekosistem dan populasi ikan tersebut akan kian surut yang tentunya akan merugikan negara-negara tersebut.

Konvensi hukum laut 1982 menerapkan prinsip pemanfaatan yang lestari, memberikan pertimbangan antara konservasi dan pemanfaatan, dan mengahurkan keterangan ilmiah dan statistik penangkapan disumbangkan dan dipertukarkan secara teratur melalui organisasi internasional.

Konvensi hukum laut 1982 memberikan kesempatan negara lain dengan persetujuan negara pantai agar dapat bersama-sama memanfaatkan penangkapan sumberdaya ikan di zona ekonomi eksklusif. Jaminan pemberian akses kepada negara-negara lain tersebut harus dengan perjanjian dan dengan memperhatikan

⁹Marhaeni Ria Siombo, Hukum Perikanan Nasional dan Internasional, Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 94

beberapa faktor, misalnya negara yang bersangkutan tidak berpantai dan secara geografis tidak menguntungkan (pasal 69 UNCLOS 1982).

Negara-negara lain yang mempunyai akses pada ZEE suatu negara pantai harus mentaati peraturan perundang-undangan negara pantai yang bersangkutan. Apabila suatu cadangan ikan berada dalam dua ZEE negara pantai atau lebih maka negara-negara yang bersangkutan harus membuat persetujuan untuk langkah-langkah konservasinya (pasal 63 UNCLOS 1982).

B. Pengelolaan Sumber Daya Ikan oleh Negara tak Berpantai di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Sumber Daya Ikan berpantai di Zona Ekonomi Eksklusif dengan demikian Kewajiban lain yang harus diperhatikan Negara pantai berkaitan dengan jenis-jenis ikan yang bermigrasi jauh (*highly migratory species*), seperti tuna. Negara-negara pantai dan negara-negara yang akan melakukan penangkapan harus bekerja sama untuk menjamin konservasi dan pemanfaatannya secara optimal serta menggalakan pendirian organisasi internasional khusus untuk maksud-maksud tersebut.

Hak-hak yang diberikan di wilayah zona ekonomi eksklusif kepada negara pantai lebih luas dari pada yang diberikan pada landas kontinen karena hak-hak atas sumber-sumber di dasar laut, tetapi juga sumber-sumber yang terdapat dalam air di atasnya. Dengan adanya penetapan ZEE Indonesia, wilayah perikanan Indonesian bertambah 2,5 juta km². potensi kekayaan laut di ZEE ini sekitar 1,86 juta ton pertahun¹⁰.

Indonesia telah menetapkan zona ekonomi eksklusifnya, dan untuk mengatur kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan di Indonesia di tetapkan Undang-undang Nomor 9 tahun 1985 tentang perikanan yang telah di sempurnakan dengan Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang perikanan. Undang-Undang Nomor 31 tahun

2004 secara tegas menetapkan sanksi terhadap penangkapan ikan yang melanggar hukum, yang meliputi seluruh wilayah perairan Indonesia, termasuk di wilayah ZEE Indonesia. Kewajiban-kewajiban yang perlu di tindak lanjuti tersebut merupakan bentuk pengakuan Indonesia terhadap adanya hak-hak Negara lain dan harus segera di akomodasi sesuai ketentuan-ketentuan yang ada.

Berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah ZEEI tersebut, dalam praktiknya Indonesia masih memiliki keterbatasan baik dari segi modal, teknologi, maupun sumber daya manusianya. Sesuai dengan ketentuan, baik dalam UNCLOS 1982 pasal 62 Undang-undang tentang ZEEI maupun Undang-undang perikanan, Indonesia wajib memberikan akses kepada pihak asing untuk memanfaatkan potensi sumberdaya perikanan di ZEE Indonesia.

Kondisi geografis Indonesia sebagai Negara kepulauan yang dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat, memiliki panjang pantai 95.181 km, dengan luas perairan 5,8 juta km² tersebut, terdiri dari:

1. Perairan laut territorial 0,3 juta km²
2. Perairan Nusantara 2,8 juta km²
3. Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) 2,7 juta km² (Dep. Kelautan dan Perikanan, laporan Tahunan 2008).

Kondisi geografis tersebut memberikan kekayaan berupa sumber daya laut dan ikan. Perairan laut yang luas dan kaya akan jenis-jenis maupun potensi perikanannya, dengan potensi penangkapan perikanan sebesar 6,4 juta ton, potensi budi daya 1,223,437 ha serta potensi kelautan kurang lebih 4 milyar USD/thn (Dep. Kelautan dan Perikanan, Laporan Tahunan 2007. Potensi tersebut apabila diusahakan secara optimal dengan tetap berpegang pada penangkapan yang lestari akan memberikan dampak :¹¹

1. Meningkatnya devisa Negara dari hasil ekspor komoditi perikanan laut
2. Meningkatnya gizi khususnya protein hewani bagi rakyat

¹⁰Marhaeni Ria siombo. Hukum Perikanan Nasional dan Internasional. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2010. hlm 1

¹¹*Ibid*

3. Meningkatnya penghasilan/pendapatan nelayan

Dalam Zona Ekonomi Eklusife, semua Negara baik Negara-negara pantai maupun Negara-negara tidak berpantai diberi hak-hak dan dibebani kewajiban-kewajiban serta kewenangan. Adapun hak-hak, kewajiban-kewajiban dan kewenangan-kewenangan pengguna Zona Ekonomi Eklusife bagi Negara pantai seperti telah di sebutkan di atas. Sedangkan pengaturan hak-hak dan kewajiban-kewajiban Negara-negara yaitu :

1. Negara-negara pantai lainnya
2. Negara-negara maritime maju
3. Negara-negara tidak berpantai
4. Negara secara geografis tak beruntung

Zona Ekonomi eklusife semua Negara baik Negara pantai maupun Negara tidak berpantai mempunyai kebebasan seperti halnya dilaut lepas, hanya saja terbatas dalam hal tertentu, yaitu dalam hal pelayaran, penerbangan, peletakkan dan pemasangan kabel-kabel dan pipa-pipa didasar laut serta penggunaan laut yang sah lainnya. Negara tak berpantai dinsamping mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam hubungannya dengan kebebasan laut lepas, juga di beri hak untuk memanfaatkan sumber-sumber hayati di Zona Ekonomi Eklusife yang tidak di manfaatkan oleh Negara pantai berdasarkan prinsip “access to the surplus of the living resources”¹²

Usaha memanfaatkan sumber daya alam perikanan di perairan Indonesia serta di Zona Ekonomi Eklusife ini dilandaskan dan di wujudkan pengalaman dari Pasal 33 UUD 1945 dalam hal menjalin kerja sama dengan Negara-negara lain baik dalam pemanfaatan atau peneglolaan Zona Ekonomi Eklusife Indonesia maupun hal-hal lain yang mneyangkut kepentingan internasional yang perlu di atur dan tidak mengatur kepentingann nasional Indonesia Indonesia sepenuhnya mengikuti ketentuan konvensi internasional yang sudah ada. Adanya ketentuan yang berlainan antara rezim laut wilayah dengan

rezim Zona Ekonomi Eklusife membawa konsekuensi pengaturan yang berbeda pada pemanfaatan sumber daya ayati di kedua wilayah ini. Berkenaan dengan Zona Ekonomi esklusife Indonesia, indonesi a terikat dengan ketentuan konvensi 1982 yang memberikan peluang bagi Negara-negara lain untuk memanfaatkan surplus dari total “allowable catch”. Sehubungan dengan ini pula Indonesia sebagai Negara hukum tetap berpegang pada tujuan nasionalnya untuk tetap meningkatkan kesejahteraan bagi rakyatnya tanpa melanggar ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dilaut terutama di Zona Ekonomi Eklusife.

Sebagai Negara berkembang, Indonesia mneghadapi masalah tersedianya teknologi maju, dana yang besar dan masalah Berhubungan dengan usaha dan pemanfaatan sumber perikanan ini, Indonesia menggunakan cara ataupun sarana yang bersifat membantu dalam meningkatkan potensi yang ada sarana-sarana itu dapat berupa permodalan yang dalam hal ini tentu dibebankan sendiri oleh Indonesia. Pemanfaatan perikanan yang merupakan salah satu sumber ekonomi ini merupakan perwujudan dari tujuan nasional kita sebagai modal dasar pembangunan nasional. Hal lain yang dapat ditarik dari usaha pemanfatan ini yang mungkin dapat dikatakan factor pendukung yang sangat penting adalah alih teknologi dan manajemen teknologi lainnya. Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemertaan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidayaan ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan.

Pemberian hak-hak kepada Negara-negara lain (Negara tak berpantai) untuk memanfaatkan surplus sumber-sumber hayati tersebut diikuti pula dengan kewajiban-kewajiban untuk memperhatikan kepentingan-kepentingan Negara yan bersangkutan, terutama perlindungan dan pelestarian

¹²Hasim Djalal, dan Noegroho Wisnoemoerti, Penjabaran Pasal-pasal ICNT dalam Komite II,1978, hlm. 182

lingkungan laut. Untuk itu Negara-negara lain (Negara tak berpantai) mentaati peraturan perundang-undangan yang diadakan oleh Negara pantai guna melindungi, memelihara dan mencadangkan sumber-sumber hayati tersebut, karena setiap tindakan pemanfaatan haruslah juga memperhatikan lingkungan hidup di laut agar kesejahteraan lingkungan laut tetap terjaga.¹³ Dengan demikian kewenangan Negara-negara baik Negara pantai maupun Negara tak berpantai di zona ekonomi eksklusif memenuhi asas keseimbangan baik dilihat dari hak, kewajiban maupun kewenangan. Yang berarti pula Konvensi Hukum Laut ke III dapat memenuhi tuntutan dari semua Negara.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif oleh Negara yang Tak Berpantai Menurut *United Nations Convention on the law of the sea 1982* (UNCLOS 1982). Meskipun negara Tak berpantai dan negara kepulauan mempunyai kedaulatan tersebut, namun negara-negara tersebut dibatasi dengan berbagai kewajiban, antara lain kewajiban menghormati hak lintas damai dan hak lintas alur laut kepulauan melalui laut teritorial dan perairan kepulauan yang dimiliki oleh kapal-kapal asing. Sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. Dengan adanya perundingan maka pembagian luas wilayah laut akan adil. Sebab dalam batas ZEE suatu negara berhak melakukan eksploitasi, eksplorasi, pengolahan, dan pelestarian sumber kekayaan alam yang berada di dalamnya baik di dasar laut maupun air laut di atasnya. Oleh karena itu, Indonesia bertanggung jawab untuk melestarikan dan melindungi sumber daya alam dari kerusakan.

Pengelolaan Sumber Daya Ikan oleh Negara Tak Berpantai di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Aturan yang ditetapkan pada tahun 1982 yang berisi kerangka hukum

resmi yang menetapkan bahwa negara memiliki kewenangan yuridiksi terhadap penindakan pelanggaran hukum di perairan laut. Pada 5 februari 2009, hukum tersebut telah diratifikasi oleh 156 negara. Di dalam praktik hak pelayaran diatur dibawah konvensi dari zona ekonomi eksklusif, negara seharusnya menghormati hak dan kewajiban negara yang memiliki garis pantai dan seharusnya mematuhi hukum dan regulasi yang diadopsi oleh negara pantai tersebut. Dasar hukum Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Pemerintah Indonesia melalui Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang ZEE Indonesia telah bertekad untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dengan cara memanfaatkan seluruh daya alam yang tersedia, baik hayati maupun non hayati. Zona Ekonomi Eksklusif ini haruslah tidak bertentangan dengan ketentuan yang disepakati bersama dalam konvensi PBB 1982 tentang hukum laut, maka Indonesia berkewajiban untuk menjaga peraturan ini lebih flexible, dalam arti satu pihak tidak merugikan kepentingan nasional dan dilain tidak ada kepentingan internasional terganggu.

B. Saran

Dengan adanya hak-hak dan kewenangan Negara pantai dan pengelolaan sumber daya ikan yang diberikan oleh hukum kepadanya untuk melakukan kegiatan di zona ekonomi eksklusif dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonominya dengan cara memanfaatkan kekayaan alam yang terdapat di jalur laut Zona Ekonomi Eksklusif. Negara pantai yang bersangkutan apabila tidak melaksanakan haknya untuk mengeksplor dan mengekploitasi sumber-sumber kekayaan alam yang terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif dan Negara-negara yang tidak berpantai dapat melakukan kegiatan yang serupa dengan persetujuan dari Negara pantai yang bersangkutan.

¹³ *Ibid*....., hlm 116

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Etty R. Agoes, Pengaturan Tentang Wilayah Perairan Indonesia dan Kaitannya dengan Hukum Laut, Makalah yang di sampaikan pada ceramah Fakultas Hukum Universitas Trisaksti, Jakarta, 1982.
- Marhaeni Ria Siombo. Hukum Perikanan Nasional dan Internasional. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2010.
- Hasim Djalal, dan Noegroho Wisnoemoerti, Penjabaran Pasal-pasal ICNT dalam Komite II.
- P. Joko Subagyo, Hukum Laut Indonesia. PT Rineka Cipta. Jakarta, 2005.

B. Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- UNCLOS 1982
- Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan

C. Internet

- Vivin R “perbedaan pemanfaatan zee antara negara berpantai dengan negara tidakberpantai,website:<<http://inspirasihukum.blogspot.com/2011/09/perbedaan-pemanfaatan-zeeantara-negara.html>>,di akses pada tanggal 16 Agustus 2013
- <http://www.fao.org/about/en/>, di akses pada tanggal 7 April 2014
- <https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=349&id=120653&src=k&f=1>>diakses pada tanggal 12 oktober 2013
- <http://inspirasihukum.blogspot.com/2011/09/perbedaan-pemanfaatan-zeeantara-negara.html>>,di akses pada tanggal 16 Agustus 2013.

BIODATA

MOHAMMAD TASRIH, Lahir di Palu, 18 Januari 1987, Alamat Rumah Jalan Merpati Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +6281354386987, Alamat Email tasrih356@gmail.com

